

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

KANTOR KECAMATAN GAPURA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Gapura merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kantor Kecamatan Gapura. Kinerja Kantor Kecamatan Gapura diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kantor Kecamatan Gapura pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Gapura, 28 Februari 2024

CAMAT GAPURA



I. IMAM SUHADI, M.M., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP: 19680527 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Isu Strategis Perangkat Daerah
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

MATRIKS RENSTRA

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Gapura selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Kecamatan Gapura merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah daratan yang terletak sebelah timur \pm 11 Km dari ibu kota Kabupaten Sumenep dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Batuputih , Manding dan Batang - Batang
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kalianget dan Selat Madura
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Dungkek
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kota Sumenep

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Gapura \pm 65,68 km persegi yang terdiri dari 17 Desa, dengan 57 Dusun, 266 RT dan 100 RW dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Dusun & Luas Wilayah se Kecamatan Gapura

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
		(Km persegi)	Dusun	RT	RW

1	P o j a	2,58	3	7	3
2	Braji	2,65	3	11	4
3	Karangbudi	4,60	3	14	6
4	Baban	2,90	3	16	5
5	Batudinding	3,92	3	3	4
6	Banjar Barat	3,19	3	4	5
7	Banjar Timur	3,15	2	9	3
8	Paloklo'an	5,89	3	21	6
9	Panagan	2,35	2	10	4
10	Gapura Barat	3,65	5	17	8
11	Gersik Putih	4,84	3	11	4
12	Gapura Tengah	4,98	3	15	7
13	Mandala	1,08	2	8	4
14	Gapura Timur	2,63	4	25	7
15	Andulang	6,35	5	27	5
16	Longos	7,47	6	41	17
17	Grujugan	3,45	4	27	8
JUMLAH		65,68	57	266	100

Sumber : BPS Kecamatan Gapura Dalam angka

Sedangkan berdasarkan topografi merupakan tingkat kemiringan tanah diantara 30 sampai 60 % atau merupakan daerah dataran rendah , kurang lebih sebanyak 11,2 % atau seluas 65.68 kilometer persegi.

Topografi.

Secara umum, tujuan dan manfaat keberadaan Kantor Kecamatan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun bagi masyarakat adalah sebagai aparat pelaksana berbagai kebijakan

Pemerintah Kabupaten atau Kepala Daerah untuk menjembatani (memfasilitasi) pelaksanaan program/kegiatan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep diwilayah, menampung serta menyalurkan berbagai aspirasi, keinginan dan kehendak dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Jumlah Penduduk

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	P o j a	679	708	1.387
2	Braji	806	848	1.654
3	Karangbudi	1.217	1.330	2.547
4	Baban	1.012	1.058	2.070
5	Batudinding	904	936	1.840
6	Banjar Barat	1.181	1.234	2.415
7	Banjar Timur	657	666	1.323
8	Paloklo'an	1.106	1.174	2.280
9	Panagan	566	609	1.175
10	Gapura Barat	1.733	1.936	3.669
11	Gersik Putih	580	643	1.223
12	Gapura Tengah	823	919	1.742
13	Mandala	333	358	691
14	Gapura Timur	1.153	1.295	2.448
15	Andulang	1.452	1.654	3.106
16	Longos	2.288	2.567	4.855
17	Grujugan	1.645	1.805	3.450
J U M L A H		18.135	19.740	37.875

Sumber : BPS Kecamatan Gapura Dalam angka

Sedangkan keadaan Demografi pada Tahun 2023 dilihat dari Kepadatan penduduk di Kecamatan Gapura Jumlah Penduduk pada *BPS Kecamatan Gapura dalam angka* adalah sebanyak **37.875** jiwa terdiri Laki-laki **18.135** jiwa dan perempuan **19.740** jiwa dari jumlah 13.105 KK dengan kepadatan penduduk 91.87 jiwa per Km (*sumber BPS Kecamatan Gapura Dalam Angka*).

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep mempunyai tugas:

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kantor Kecamatan mempunyai fungsi :

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tugas dan fungsi Sekretariat, sebagaimana pada paragraf 1 Pasal 7, yaitu :

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan, Keuangan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
 - c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. Penyelenggaraan tata usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;

- e. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Pada pasal Pasal 8, menyebutkan, bahwa :

- (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
 - c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- (2) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
 - b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
 - c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sebagaimana pada paragraf 2 pasal 9 Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, yaitu : Seksi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sebagaimana pada paragraf 3 pasal 10 Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;

- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sebagaimana pada paragraf 4 pasal 11 Tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada paragraf 5 pasal 12 Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, bahwa Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan social, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;

- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Sebagaimana pada paragraf 6 pasal 13 Tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Umum, bahwa Seksi Pelayanan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

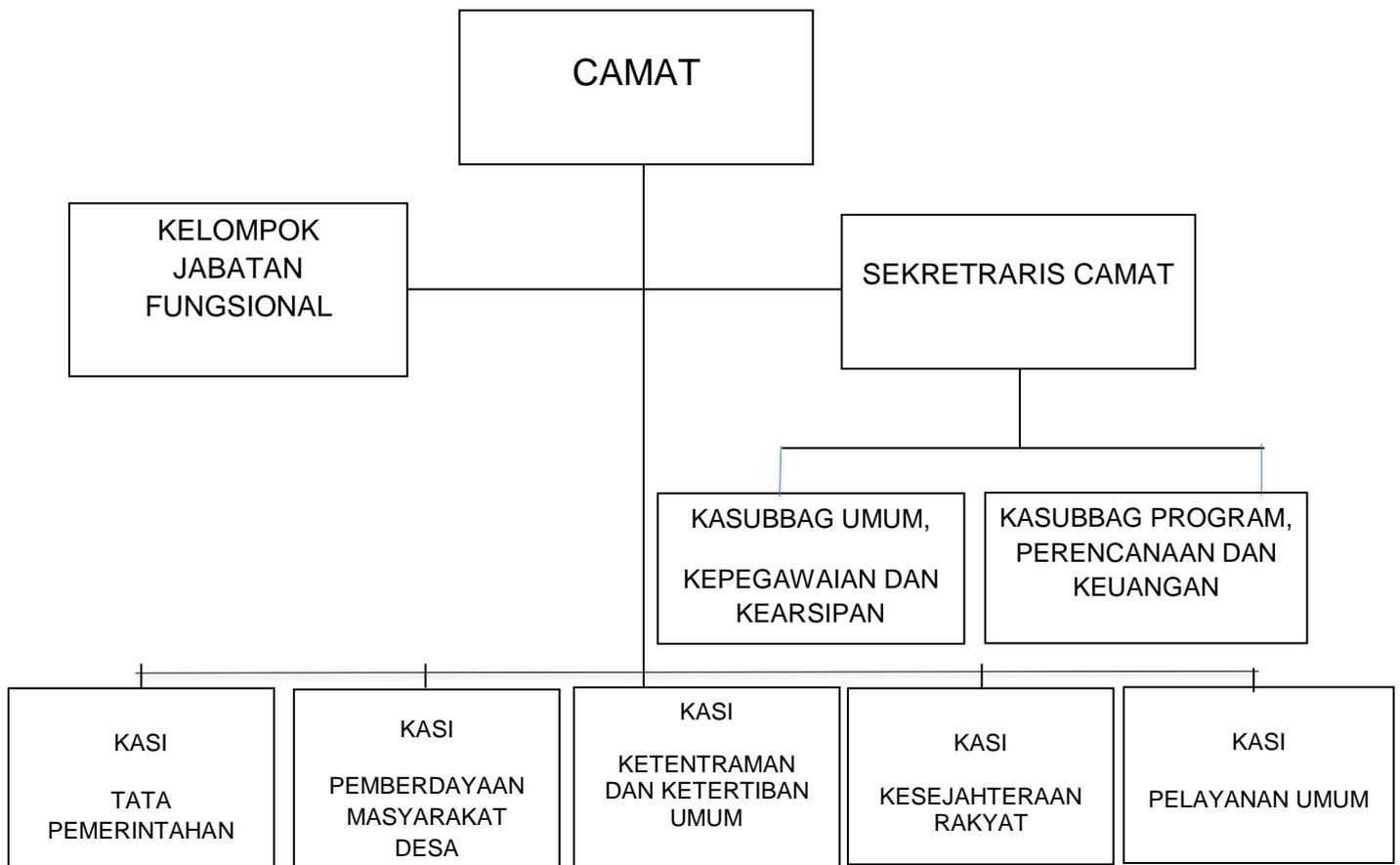
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Para Kasi dan Kasubbag. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi

Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. 1 (satu) Orang Camat (Eselon III/a)
- b. 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III/b)
- c. 5 (lima) Orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
- d. 2 (dua) Orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV/b)



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kantor Kecamatan Gapura periode 2021-2026 sebagai berikut :

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Gapura

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Gapura yang kurang maksimal dan dari segi SDM yang kurang maksimal (tingkat pendidikan yang minim)
 - b. Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil;
 - c. Jaringan Internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan;
 - d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Perangkat Daerah Kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - e. Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa.
2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Gapura dapat kami jabarkan sebagai berikut :,
- a. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
 - c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.

- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Masih lemahnya koordinasi antar OPD
- f. Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- g. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan Data.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep harus memperhatikan indikasi-indikasi yaitu sebagai berikut :

- Kec. Gapura Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kecamatan;
- Kec. Gapura Merupakan Wilayah Pengembangan Sistem Jaringan Produk lokal;
- Kec. Gapura Merupakan Wilayah Pengembangan Wisata, Seperti pantai keris dan Hutan Mangrove;

Atas paparan tersebut diatas, dapat kami simpulkan terhadap permasalahan dan isu strategis pada Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5.1

Permasalahan dan Isu Strategis

Perangkat Daerah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan Pelayanan	Minimnya anggaran yang ada

2	SDM yang tidak cukup dari segi pengetahuan	Jumlah Peesonil yang kurang dan minimnya tingkat pendidikan terutama di bidang tekhnologi
3	Desa yang memproduksi Produk lokal sulit untuk mencari pemasaran ke luar daerah	Sulitnya wadah atau lembaga yang menangani pemasaran produk lokal

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kantor Kecamatan Gapura periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Gapura ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA.”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Gapura berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 4, dan 7 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan sumber manusia yang berdaya saing	* Meningkatnya n kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan; * Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat * Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan Daerah	Indeks Pendidikan , indek kesehatan, pengeluaran perkapita di sesuaikan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pengangguran gender.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir	Meningkatkan derajat dan kemandirian ekonomi Masyarakat	Menurunkan Kesenjangan, Meningkatkan pendapatan perkapita, Meningkatkan PAD, Meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan	Indeks Gini, pendapatan perkapita orang/pertahun, persentase pertumbuhan sektor unggulan PAD, PDRB pertanian perhutanan dan perikanan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Incremental Capital output ratio.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas tanggap dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik yang inovatif berbasis e-governement, pengembangan Kapasitas aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah, terwujudnya birokrasi yang akuntabilitas dan transparan	Indeks SPBE, Nilai IKM, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Profesionalisme Aparatur, Nilai Sakip, opini atas audit BPK, tingkat Manuritas SPIP
4	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan	Mewujudkan harmonisasi sosial yang berkearifan Lokal,	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat, meningkatkan solidaritas	Nilai stabilitas, nilai solidaritas sosial, indeks Gotong royong

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Berkearifan lokal		sosial di masyarakat, terwujudnya nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat.	
5	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Yang Berimbang Antara Berbasis Lingkungan Antara Daratan Dan Kepulauan	Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata, meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	87	87.15	87.30	87.45	87.55
		Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	17	17	17	17	17
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kantor Kecamatan Gapura periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Indeks SKM Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Bobot Pencapaian SKM	Dokumen SKM
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS		<p>Jumlah Hasil Koordinasi Bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat.</p> <p style="text-align: center;">_____ x 100%</p> <p>Jumlah Koordinasi yang di laksanakan</p>	Laporan Hasil Penyelesaian
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Masyarakat Desa Yang Dapat Diberdayakan				Kasi PMD

4	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Oleh Masyarakat Hasil Musrenbangca m Dapat Disetujui di Tingkat Kabupaten				Sekretariat
5	Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda				
6	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggara n Pemerintahan Desa Tepat Waktu				Kasi Tapem
		Persentase Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan				

		Lainnya Yang Didelegasikan Ke Kecamatan Dapat Dilaksanakan dengan Baik				
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif		Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks Inovasi Daerah	Lanyanan	98% 98% 98%
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur		98%
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan	1. Nilai saki 2. Opini atas 3. Tingkat Maturitas SPIP	Laporan	BB 98% 98%

			Transparan			
--	--	--	------------	--	--	--

Sumber : Rencana Kerja Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi

anggaran dan Poin 1 (satu) Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	layanan	86,15	87
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Desa	17 Desa	100 %
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Gapura:

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Gapura Sebelum dan
Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	2.720.263.42 8	2.815.552.918
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	100	14.681.600	14.681.600
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	100	32.124.200	32.124.200
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	100	12.693.200	12.693.200
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	100	164.800.000	164.800.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	100	30.917.400	30.917.400

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kantor Kecamatan Gapura melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kantor Kecamatan Gapura dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Gapura.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kantor Kecamatan Gapura Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.15	14.671.200	99,93 %		Dokumen SKM
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	100	12.600.000	99,30 %		1 Seksi Tapem 2 Seksi PMD 3 Seksi Kesra 4 Seksi Trantibum

Uraian penjelasan tabel :

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan Gapura menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini terbukti dengan memperoleh tingkat kepuasan terhadap Masyarakat sebesar 99,93 % ini berkat dukungan dari semua stekholder yang ada, dan termasuk penyelesaian masalah yang di tangani oleh Kecamatan sebesar 99,30 % artinya setiap masalah yang ada tetap dilakukan mediasi oleh FORPIMKA yang ada di kecamatan sehingga hal – hal yang ditidak di inginkan tidak terjadi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	99	80 %	87.15	99.92	99,93 %
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIB MAS	100	100	100 %	100	99,26	99,30 %

Uraian penjelasan tabel :

Untuk capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Gapura pada tahun 2022 terealisasi 99 dengan persentase 80% sedangkan pada tahun 2023 terealisasi 99,92 hal ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi 99,92 dengan capaian kinerja 99,93%.

Untuk Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di sektor Kecamatan pada tahun 2022 terealisasi dengan capaian kinerja 100% sedangkan pada Tahun 2024 terealisasi 99.26 dengan capaian kinerja 99.30 %.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No .	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	95.73	87.55	109,4
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	72,30	100	72,30

Uraian penjelasan tabel :

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Gapura meningkat menjadi 109,4 % hal ini disebabkan oleh banyaknya permohonan masyarakat dan masyarakat sadar dengan adanya administrasi pelayanan.

Hasil evaluasi atas sistem Akuntabilitas Kinerja yang ada di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 70,20 dengan Katagori B (baik) sedangkan pada Tahun 2023 Kantor Kecamatan Gapuran memperoleh nilai 72.30 dengan katagori BB (sangat Baik) hal ini sudah mengalami kenaikan dari Tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten Sumenep lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	2.695.407.907	95,73	Terserap /terrealisasi 100% namun estimasi anggaran yang melebihi pagu dari gaji ASN	Dilakukan pengembalian ke Kasda Kabupaten sumenep
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100	14.671.200	99,93	Terealisasi	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100	32.118.200	99,98	Terealisasi	

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100	12.600.000	99,26	Terealisasi	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100	107.141.700	65,01	Tidak terserap 100% dikarenakan penentuan waktu dari Narsum DPRD yang sulit di tentukan	Perlu perencanaan yang matang terutama waktu dari Narsum (koordinasi)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100	30.874.400	99,86	Terealisasi	

Uraian penjelasan tabel :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Anggaran Belanja Pegawai / Gaji ASN sudah terserap 100 % namun anggaran melebihi dari Pagu Anggaran Gaji yang ada sehingga perlu di kembalikan ke kasda Kabupaten Sumenep.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan Gapura yang terserap hanya 65,01% dari Target yang sudah di tentukan dikarena adanya penentuan waktu dari Nara sumber Dewan perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang sulit di tentukan. Hal ini perlu dilakukan koordinasi sebelum pelaksanaan perencanaan Penganggaran dan kegiatan di sahkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantorkantor	100%	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	100%	Menunjang

				Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	Menunjang
				Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	100%	Menunjang
				Pengadaan peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan	100%	Menunjang

				lainnya	dan mesin lainnya yang disediakan		
				Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah unit Aset tetap lainnya yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Menunjang
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	Menunjang
				Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	Menunjang
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada	99,92 %	Menunjang

				Koordinasi /sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah kegiatan Koordinasi /sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	Menunjang
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100%	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100%	Menunjang
				Peningkatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Keluarga	100%	Menunjang
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Desa Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan	100%	Menunjang

					pembangunan di Desa		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	99,26 %	Menunjang
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila , pelaksanaan undang – undang dasar RI Tahun 1945 pelestarian Bhinneka tunggal ika serta pemertahanan keutuhan negara kesatuan RI	Jumlah kegiatan hari jadi Kabupaten Sumenep dan kegiatan pameran pembangunan.	65,01%	Menunjang
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	99,86 %	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan Gapura yang terserap hanya 65,01% dari Target yang sudah ditentukan dikarenakan adanya penentuan waktu dari Nara sumber Dewan perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang sulit di tentukan. Hal ini perlu

dilakukan koordinasi sebelum pelaksanaan perencanaan Penganggaran dan kegiatan di sahkan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.815.552.918	2.695.407.907,00	95,73%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.681.600	14.671.200	99,93 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.124.200	32.118.200	99,99%
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.693.200	12.600.000	99,26%
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	164.800.000	107.141.700	65,01%
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.917.400	30.874.400	99,86%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esistensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	95,73%	2.815.552.918	2.695.407.907,00	95,73%	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	99,93 %	14.681.600	14.671.200	99,93 %	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	99,99%	32.124.200	32.118.200	99,99 %	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	99,26%	12.693.200	12.600.000	99,26 %	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	65,01%	164.800.000	107.141.700	65,01%	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	99,86%	30.917.400	30.874.400	99,86%	

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	terpenuh nya kebutu- han sarana dan prasara- na kantor	95,73%	2.815.552.918	2.695.407.907	95,73	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	99,93 %	14.681.600	14.671.200	99,92%	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	99,99%	32.124.200	32.118.200	99,98 %	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	99,26%	12.693.200	12.600.000	99,26 %	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	65,01%	164.800.000	107.141.700	65,01 %	
6.	PROGRAM PEMBINAAN	100%	Pemerintahan	99,86%	30.917.400	30.874.400	99,86%	

	DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA		desa yang sudah diberikan pembekal an					

Uraian penjelasan tabel :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dengan realisasi 95,73% dengan realisasi anggaran 2.695.407.907, untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dngan indikator kinerja Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan dengan realisasi kinerja 99,93 % dengan realisasi anggaran 14.671.200, untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator kinerja adanya lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan dengan realisasi 99,99% dan serapan anggaran 32.118.200 sedangkan untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum indikator kinerja adanya Kerjasama mengenai Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana di Kecamatan Gapura dengan indikator kinerja 99,26% dan dengan realisasi anggaran 12.600.000. sementara untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan 65,01% dengan serapan anggaran 107.141.700 hal ini di pengaruhi oleh terbatasnya waktu yang ada oleh narasumber Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, dan untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target kinerja jumlah Pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan dengan persentase kinerja 99,86% dengan realisasi anggaran 30.874.400.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara rinci pencapaian tujuan Tahun 2023 Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 6 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) Sub kegiatan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.815.552.918 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.695.407.907 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 95,73 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,27%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kantor Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 28 Februari 2024

CAMAT GAPURA
KABUPATEN SUMENEP



Ir. IMAM SUHADI, M.M., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP: 19680527 199703 1 003

